

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA
TRANSAKSI MUSYARAKAH di PENGADILAN AGAMA
SURABAYA:**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI DEWI JAYANTI
NIM. C02215059



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Putri Dewi Jayanti

NIM : C02215059

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad
Musyārahah pada Bank Muamalah Indonesia:
(Studi Putusan No. 749/Pdt.G/2015/PA.Ska).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Putri Dewi Jayanti

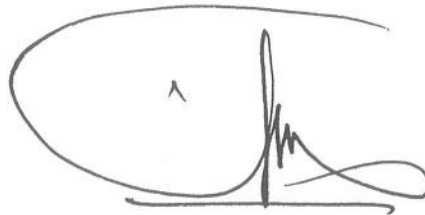
NIM. C02215059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dewi Jayanti NIM. C02215059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosakan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical stroke with a small hook on the right, all enclosed within a thin horizontal line above and below.

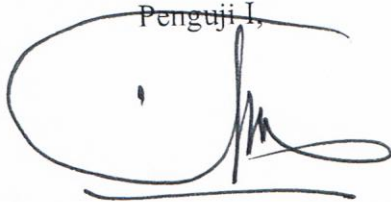
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 19580808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dewi Jayanti NIM. C02215059 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 13 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



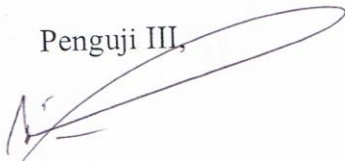
Prof. Dr. H. Abu Azam Al- Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



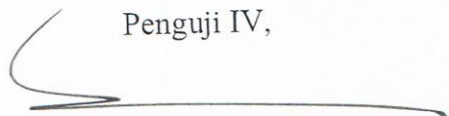
Drs. H. Akh. Mukkaram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III,



Moh. Hatta, S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
NUP. 201603306

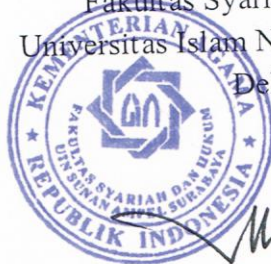
Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Dewi Jayanti
NIM : C02215059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : putridj100397@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TRANSAKSI
MUSYARAKAH di PENGADILAN AGAMA SURABAYA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

Putri Dewi Jayanti

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang wanprestasi dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska dalam hal akad *musyārahah* yang menyebabkan terjadinya lelang lalu dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, memuat penjelasan umum serta landasan teori mengenai konsep adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad *musyārahah* dalam Hukum Islam. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pertama memuat makna Wanprestasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, juga faktor-faktor penyebab serta penyelesaiannya dalam Hukum Islam. Kedua mengenai pengertian, syarat-syarat, macam-macam, dasar hukum, klasifikasi, dan penjelasan lain mengenai pembiayaan dengan akad *Musyārahah*.

Bab III, memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad

musyārahah dalam Hukum Islam., yang berupa kasus posisi dan dasar serta pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

Bab IV, memuat tentang penyelesaian sengketa akad *musyārahah* pada Bank Muamalah Indonesia perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska. tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska , juga analisis yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan Surakarta yang salah satu keputusannya menolak perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad *musyārahah*.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan sengketa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerduta.
- f. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :
1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
 2. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dana apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Pasal 1243 KUH Perdata :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :
- a. Jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melaksanakannya.
 - b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.
 - c. Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditur tersebut menjadi 5 (lima) kemungkinan tuntutan, yaitu :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a) Pemenuhan perjanjian;
- b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c) Pembatalan perjanjian;
- d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

2 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyārahah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai tergugat III yang digugat karena telah berkerja sama untuk melelang barang dari akad *musyarakah* yang berbentuk tanah dan bangunan tanpa diketahui si penggugat.

Awalnya, si penggugat adalah debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I selaku kreditur lembaga perbankan syariah berupa fasilitas pembiayaan kredit *musyarakah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat No. 012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah. Bahwa sebagai jaminan fasilitas kredit *musyarakah* antara pelawan dengan adalah berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 106 atas nama XXX yang terletak di Sroyo RT 07 RW 09 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, luas ± 575 m², yang disebut obyek sengketa.

Pada awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan usaha akhirnya Penggugat mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban membayar angsuran, tetapi penggugat beritikad baik menyelesaikan kewajiban angsuran dan pernah mengajukan permohonan penundaan penyelesaian kewajiban kredit tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I. Bahwa atas kesulitan membayar yang dialami penggugat akibat usaha penggugat sedang mengalami hambatan, langkah Tergugat I melakukan upaya lelang eksekusi terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II untuk pelunasan kewajiban kredit Penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Lelang No. 757/BMI-SLO/X/2015 tertanggal 15 Oktober dan oleh

melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketa atas permohonan lelang eksekusi dari tergugat I, adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum pada dasarnya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, dan apakah tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa untuk pelunasan pembiayaan kredit musyarakah.

Menimbang, bahwa Terlawan dalam menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P. 1 dan P. 2.

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (fotokopi kartu tanda penduduk) Terlawan, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa Terlawan beralamat di Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Terlawan I dan Terlawan II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (fotokopi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah*) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pembiayaan *musyarakah* Terlawan kepada PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk., (tergugat I) dapat disetujui, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat I, sehingga

Menimbang, bahwa bukti T II. 10 (fotokopi Surat Risalah Lelang) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa bukti berita acara hasil pelaksanaan lelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 38 tanggal 10 Februari 2009 pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 antara tergugat I dan penggugat disebutkan dalam Pasal 19 ayat 4, dikatakan bahwa “Namun apabila ternyata di daerah/wilayah hukum dimana para pihak yang mengadakan akad tidak terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataupun Badan Arbitrasi Syariah lainnya atau berdasarkan kesepakatan para pihak, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih dan menetapkan tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Agama Surakarta”, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang

dari 100% dari jumlah modal yang disertakan padahal *musyārahah* dalam fiqh, kontribusi prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan *musyārahah* PT. Bank Muamalah Indonesia sudah sesuai karena menggunakan nisbah bagi hasil dalam pembagian keuntungan, akan tetapi penyertaan jaminan pada pembiayaan *musyārahah* di PT. Bank Muamalah Indonesia lebih dari 100% dari jumlah modal belum sesuai dengan konsep fiqh dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 point c dan point d. Dimana poin c perihal keuntungan telah dipaparkan, yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan seorang mitra. Sedangkan poin d perihal kerugian telah dipaparkan, yaitu kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1. Konsep Hukum Jaminan yang Diaplikasikan PT. Bank Muamalah Indonesia

Jaminan dalam PT. Bank Muamalah Indonesia mengacu pada UU perbankan syariah. Menurut PT. Bank Muamalah Indonesia manfaat jaminan adalah sebagai *second way out* apabila terjadi *wanprestasi*, sehingga jaminan dapat di jual atau lelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam UU No. 10 tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam pasal 1 angka 25 UU

B. Analisis yang menjadi Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Pada kasus sengketa ekonomi syariah yang diangkat ke ranah Pengadilan Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta ini dalam putusan akhirnya, Majelis menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang pelawan. Alasan Majelis Hakim dalam menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang Pelawan ini adalah karena bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya atas nilai kerugian riil (*riil loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang yang hilang (*al furshatul adha'iyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.

Pihak PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk sendiri melelangkan barang jaminan tersebut dengan alasan :

1. Tergugat I melelangkan barang jaminan tersebut agar modal dari akad *musyarakah* tersebut kembali. Karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk mengangsur pembiayaannya.
2. Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) pihak Pergugat, sehingga pembagian nisbah bagi hasil untuk para penabung atau depositan lain juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan depositan) untuk terus menabung di PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk.
3. Dan telah wanprestasi nya Penggugat dalam perjanjian akad *musyarakah*.

diderita pihak PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk. ketika nasabahnya melakukan wanprestasi. Setidaknya nilai ganti rugi immateriil yang dituntut sebesar Rp 338.315.988,40 itu dapat lebih diperinci agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi.

Lalu dalam hal ini, Majelis Hakim yang menangani perkara seperti ini memang dituntut untuk lebih bijaksana dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.

Penulis menilai, dalam hal memberikan putusan terhadap gugatan perlawanan eksekusi lelang pelawan dan ganti rugi immateriil, selain harus lebih bijaksana perlu kiranya Majelis lebih terbuka untuk melihat peraturan atau ketentuan lain yang mengatur pokok permasalahan yang sama seperti KUHPerdara sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Karena walau bagaimanapun Lembaga Peradilan Agama masih berada dibawah pemerintahan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang juga memiliki peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitupun dalam melakukan usaha mereka membutuhkan mitra untuk melakukan sebuah usaha, yang mempunyai modal dan membutuhkan orang yang mempunyai keterampilan begitupun sebaliknya yang mempunyai keterampilan membutuhkan orang yang mempunyai modal begitupun seterusnya.

berakhir dengan tindakan *wanprestasi* ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārahah* dan akhirnya PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk melelangkan barang jaminan dari akad *musyārahah* tersebut. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārahah* apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat *ṣiḡhat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārahah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyārahah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārahah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (Tergugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian fatal yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus *wanprestasi*. Dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Agar tidak terjadi kesalah fahaman antara debitur dan kreditur dalam mengimplementasikan akad. Dan dahulukan musyawara dengan pihak nasabah sebelum melelangkan barang jaminan tersebut karena perbankan syariah menggunakan musyawarah agar

ada bedanya dengan bank konvensional. Dan pihak Bank harus memahami dan menjelaskan kepada nasabah terdahulu jenis *musyarakah* yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut.

2. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah hendaknya lebih fleksibel dan tidak mengacu pada acuan hukum yang terbatas. Wawasan terhadap hal interaksi ekonomi dimasyarakat hendaknya lebih diperluas. Sehingga pada saat mempertimbangkan sebuah gugatan ekonomi tidak terkesan kaku dan dapat menghasilkan putusan yang adil serta tidak merugikan para pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah.
3. Bagi nasabah (Penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih bertanggung jawab. Dan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk mengansur tanggungan itu sehingga pihak bank tidak sampai melelangkan barang jaminan tersebut.
4. Bagi para pembaca dan simpatisan hendaknya lebih tergugah untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan kontemplasi pembaca supaya tidak mengalami hal yang serupa.

